

---

## ARTICLE

### Perbandingan Pembangunan Berkelanjutan antara Skema Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan

Fatoni Aziz<sup>1\*</sup> dan Novita Tresiana<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, JL Prof Dr. Ir. Sumantri Bojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Aziz, F., Tresiana, N., (2025) Perbandingan Pembangunan Berkelanjutan Antara Skema Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan.

---

#### Article History

Received: 8 Agustus 2025  
Accepted: 20 September 2025

#### Keywords:

Sosial Forestry  
Community Forestry  
Village Forest

#### Kata Kunci:

Perhutanan Sosial  
Hutan Kemasyarakatan  
Hutan Desa

#### ABSTRACT

*This study aims to compare sustainable development between members of forest farmer groups under the Community Forestry (Hutan Kemasyarakatan/HKm) and Village Forest (Hutan Desa/HD) schemes in enhancing community welfare in South Lampung Regency. Employing a quantitative approach with a comparative method, the study involved 73 respondents, consisting of 40 members from KTH Rangai Sejahtera (HKm scheme) and 33 members from LPHD Way Kalam (HD scheme), selected through simple random sampling. The research variable focuses on sustainable development, measured using the Sustainable Livelihoods Framework (SLF). Data were analyzed using the non-parametric Mann-Whitney U-Test, which revealed a statistically significant difference in sustainable development outcomes between the two forestry schemes in terms of their contribution to community welfare. KTH Rangai Sejahtera is characterized by nutmeg (*Myristica fragrans*) as its primary commodity, cultivated extensively across most managed lands and processed into various derivative products. In contrast, LPHD Way Kalam demonstrates strengths in social management and community-based ecotourism, particularly through the utilization of natural attractions such as the Way Kalam Waterfall.*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pembangunan berkelanjutan antara anggota kelompok tani hutan dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Sampel penelitian berjumlah 73 responden, terdiri atas 40 anggota KTH Rangai Sejahtera (HKm) dan 33 anggota LPHD Way Kalam (HD), yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling*. Variabel dalam penelitian ini meliputi pembangunan berkelanjutan yang diukur melalui *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF). Hasil analisis menggunakan uji non-parametrik Mann-Whitney U-Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pembangunan berkelanjutan antara Skema Hutan Kemasyarakatan dan Skema Hutan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KTH Rangai Sejahtera memiliki komoditas Utama yaitu Pala yang hampir merata di setiap lahan garapan dan memiliki

---

\* Corresponding Author  
Email : fatoniaziz917@gmail.com

Produk turunan dari Pala, sementara LPHD Way Kalam unggul dalam pengelolaan sosial dan adanya jasa ekowisata yaitu Air Terjun Way Kalam.

---

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia, khususnya di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Keberadaan hutan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, antara lain sebagai daerah resapan air, penyerap karbon dioksida, serta pencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Namun demikian, tekanan terhadap kawasan hutan akibat aktivitas manusia, terutama deforestasi yang disebabkan oleh keterbatasan akses lahan bagi masyarakat sekitar hutan, masih menjadi persoalan serius.

Deforestasi sering kali terjadi karena masyarakat lokal harus memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tidak memiliki akses legal terhadap lahan hutan. Akibatnya, pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan tanpa izin yang sah dan menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk kemiskinan, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan. Data dari Sekretariat Negara Republik Indonesia (2016) menunjukkan bahwa lebih dari 25.000 desa berada di dalam atau sekitar kawasan hutan, dan lebih dari 36% penduduknya hidup dalam kondisi miskin.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan program Perhutanan Sosial yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 9 Tahun 2021 dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema pengelolaan hutan seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD).

Program Perhutanan Sosial tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam bidang pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah dengan pencapaian Perhutanan Sosial tertinggi, di mana hingga tahun 2024 telah mencakup lebih dari 234.000 hektar kawasan hutan dan melibatkan lebih dari 89.000 kepala keluarga.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada dua kelompok pengelola hutan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahtera sebagai representasi skema HKm dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Way Kalam sebagai representasi skema HD. KTH Rangai Sejahtera dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berupa pala dan produk turunannya, sedangkan LPHD Way Kalam mengembangkan ekowisata berbasis konservasi seperti Air Terjun Way Kalam dan usaha masyarakat berbasis hasil hutan.

Meskipun kedua skema bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang lestari, hingga saat ini belum banyak studi yang secara komprehensif membandingkan efektivitas keduanya dari perspektif pembangunan berkelanjutan. Terlebih, belum tersedia analisis yang mengukur kontribusi masing-masing skema terhadap modal-Modal penghidupan masyarakat secara sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF) yang mencakup lima modal penghidupan utama: modal alam, modal finansial, modal manusia, modal sosial, dan modal fisik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran

yang lebih utuh mengenai kontribusi skema Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan secara berkelanjutan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana untuk memadukan ketiga aspek tersebut guna menjamin kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan tidak hanya menekankan pemanfaatan secara ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan inklusi sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF) yang dikembangkan oleh Scoones (1998) dan dikukuhkan oleh DFID (1999). Kerangka ini menilai kesejahteraan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat melalui lima jenis modal: modal alam, modal finansial, modal manusia, modal sosial, dan modal fisik. SLF memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap bagaimana individu dan komunitas memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membangun ketahanan dan mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan.

### Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, baik dalam dimensi material maupun non-material, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Midgley (1995) mendefinisikan kesejahteraan sebagai kemampuan individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup serta menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi. Dalam konteks modern, kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup, akses terhadap layanan dasar, dan kepuasan subjektif terhadap kehidupan (Diener, 2003).

Diener (2009) mengembangkan *Satisfaction with Life Scale* (SWLS) sebagai alat ukur kesejahteraan subjektif (Subjective Well-being), yang berfokus pada evaluasi kognitif individu terhadap kehidupannya. Sementara itu, kesejahteraan sosial menurut UU No. 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal.

### Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan hak kelola kawasan hutan kepada masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap ekosistem hutan. Diatur melalui Permen LHK No. 9 Tahun 2021, program ini mencakup lima skema utama, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan.

Skema HKm memberi hak kepada kelompok tani atau koperasi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan lindung atau produksi secara legal dan terbatas. Sementara itu, skema HD dikelola oleh lembaga desa dengan pendekatan berbasis komunitas desa secara menyeluruh. Kedua skema ini memiliki karakteristik berbeda dalam struktur kelembagaan, bentuk pemanfaatan lahan, dan strategi pemberdayaan.

### **C. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif, yang bertujuan untuk menguji perbedaan pembangunan berkelanjutan antara dua skema Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Pendekatan kuantitatif digunakan karena mampu memberikan pengukuran yang objektif terhadap variabel-variabel yang diteliti serta memungkinkan dilakukan uji hipotesis secara statistik Machali (2021). Lokasi dan Waktu Penelitian. Penelitian dilakukan di dua lokasi di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu KTH Rangai Sejahtera, penerima izin pengelolaan melalui skema HKm, berlokasi di Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung dan LPHD Way Kalam, penerima izin pengelolaan melalui skema HD, berlokasi di Desa Way Kalam, Kecamatan Panengahan. Penelitian dilaksanakan selama bulan Januari 2025.

Populasi dan Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota aktif kelompok KTH Rangai Sejahtera (409 orang) dan LPHD Way Kalam (132 orang). Teknik simple random sampling digunakan untuk menentukan sampel, dengan jumlah responden sebanyak 73 orang, terdiri dari 40 responden dari KTH Rangai Sejahtera dan 33 responden dari LPHD Way Kalam. Jumlah ini diperoleh berdasarkan perhitungan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 15% menurut Dewi (2023). Teknik Pengumpulan Data, data dikumpulkan melalui dua teknik utama, kuesioner, yang digunakan untuk mengukur persepsi dan pengalaman responden terhadap pembangunan berkelanjutan berdasarkan indikator *Sustainable Livelihoods Framework* (SLF). Skala Likert empat poin digunakan untuk menilai jawaban dan studi pustaka, digunakan untuk mendukung kerangka konseptual dan memperkuat interpretasi data.

Variabel dan Instrumen Penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah skema Perhutanan Sosial (HKm dan HD), sedangkan variabel dependen adalah pembangunan berkelanjutan, yang diukur melalui lima dimensi SLF yaitu: Modal Alam (*Natural Capital*), Modal Finansial (*Financial Capital*), Modal Manusia (*Human Capital*), Modal Sosial (*Social Capital*), Modal Fisik (*Physical Capital*). Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing modal dalam SLF, dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan skor pembangunan berkelanjutan pada masing-masing kelompok sementara Uji inferensial menggunakan *Mann-Whitney U-Test*, karena data tidak terdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam capaian pembangunan berkelanjutan antara skema HKm dan HD.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi yang menjadikan perwakilan dari dua skema program perhutanan sosial, yaitu skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan skema Hutan Desa (HD), yang berada di Kabupaten Lampung selatan. Lokasi pertama adalah Kelompok Tani Hutan Rangai Sejahtera di Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, yang menjalankan skema HKm. Lokasi kedua adalah Kelompok Tani Hutan Way Kalam di Pekon Way Kalam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, yang mengelola hutan dengan skema HD.

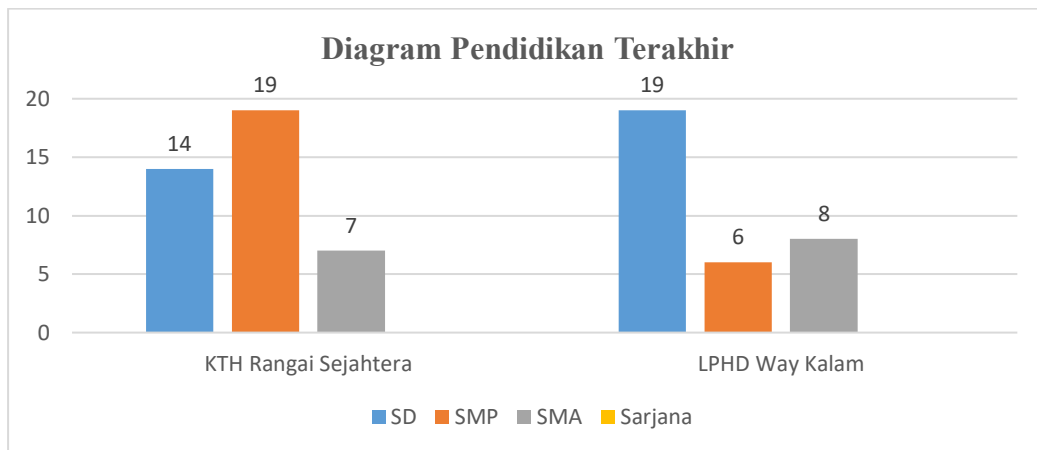
Kelompok Tani Hutan Rangai Sejahtera terletak di Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Rangai Tri Tunggal memiliki luas wilayah 2.413 hektar. Desa ini memiliki populasi penduduk yaitu berjumlah 8.897 jiwa dengan 4.511 perempuan dan 4.368 laki-laki. Desa Rangai Tri Tunggal memiliki perbatasan dengan daerah lainnya dengan batas wilayah sebagai berikut: Batas Utara berbatasan dengan Desa Srengsem, Batas Timur berbatasan dengan Desa Suban, Batas Selatan berbatasan dengan Desa Tarahan, Batas Barat berbatasan dengan Teluk Lampung.

Lembaga Pengelola Hutan Desa Way Kalam terletak di Desa Way Kalam, Kecamatan Panengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Desa Way Kalam memiliki luas wilayah 1.349 ha yang terdiri dari 399 ha untuk pemukiman, tanah sawah, tanah ladang, dan perkebunan sedangkan 950 ha merupakan kawasan tanah hutan. Desa ini memiliki populasi penduduk yaitu berjumlah 1.245 jiwa dengan 603 perempuan dan 646 laki-laki. Desa Way kalam memiliki perbatasan dengan daerah lainnya dengan batas wilayah sebagai berikut: Batas Utara berbatasan dengan Desa Kelau, Desa Ruang Tengah, dan Desa Pasuruan. Batas Timur berbatasan dengan Desa Padan, Batas Selatan berbatasan dengan kawasan hutan Gunung Rajabasa, Batas Barat berbatasan dengan Desa Kampung Baru dan Desa Banjarmasin.

### Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik responden dalam penelitian ini berperan penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sosial dan ekonomi anggota kelompok tani hutan yang menjadi fokus kajian. Penelitian ini melibatkan total 73 responden, yang terdiri atas 40 orang dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahtera dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), serta 33 orang dari Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Way Kalam dalam skema Hutan Desa (HD). Adapun berikut disajikan perbandingan karakteristik responden dalam penelitian ini.

**Gambar 1 . Diagram Batang Pendidikan Terakhir**



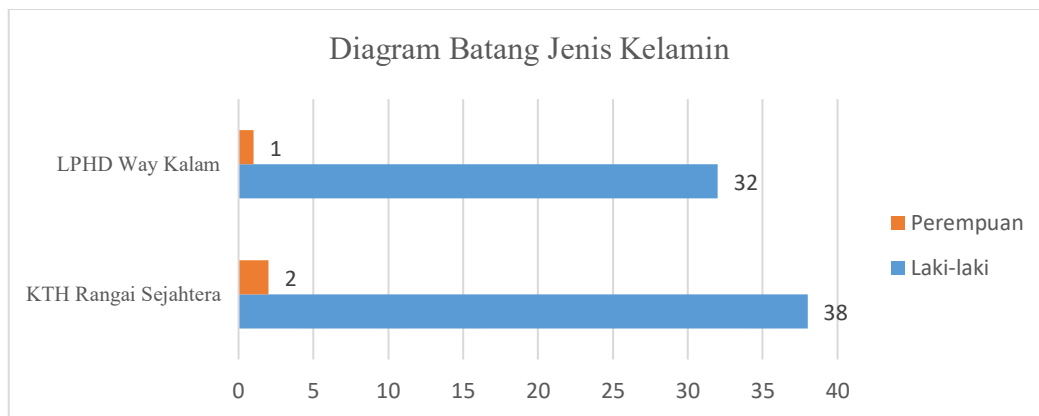
*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025*

Berdasarkan Gambar 1 yang menyajikan data dalam bentuk grafik, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahtera memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni sebanyak 19 orang. Jumlah tersebut diikuti oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 14 orang, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 7 orang, serta satu orang responden yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Sementara itu, responden dari Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Way Kalam didominasi oleh lulusan SD sebanyak 19 orang, diikuti oleh lulusan SMA sebanyak 8 orang, dan lulusan SMP sebanyak 6 orang.

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dari kedua kelompok memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Meskipun demikian, keberadaan satu orang lulusan perguruan tinggi di KTH Rangai Sejahtera mencerminkan adanya potensi sumber daya manusia dengan kapasitas pendidikan yang lebih tinggi. Keberadaan individu dengan pendidikan tinggi tersebut dapat menjadi aset penting bagi

kelompok, terutama dalam mendukung tata kelola kelembagaan, pelaporan administrasi, serta perluasan akses terhadap informasi dan peluang kemitraan ke depan.

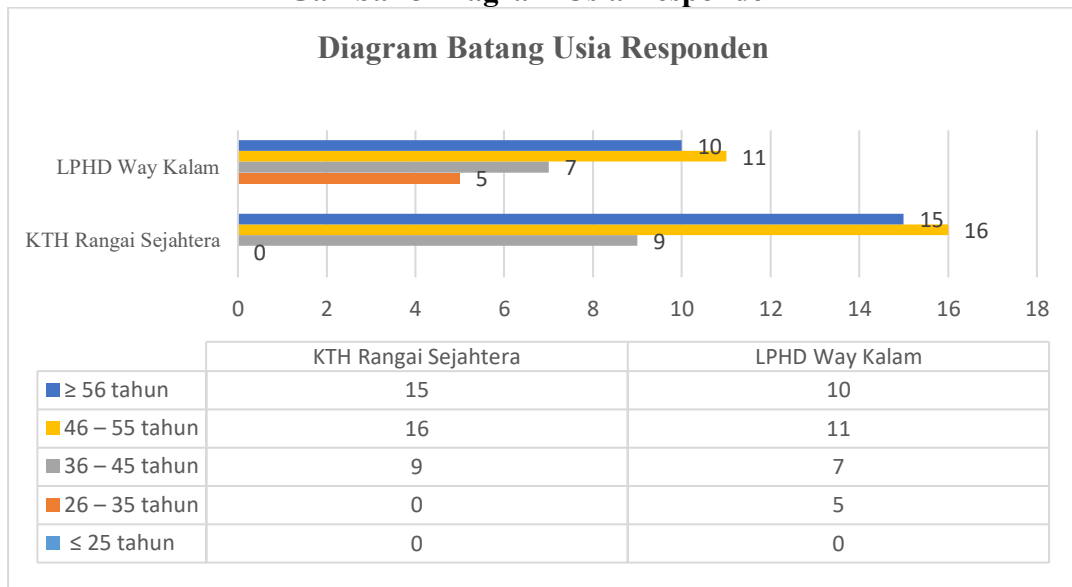
**Gambar 2. Diagram Batang Jenis Kelamin**



*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025*

Berdasarkan gambar 2 menunjukan bahwa hasil survei lapangan, diketahui bahwa mayoritas responden pada kedua lokasi penelitian merupakan laki-laki. Di Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahtera, sebanyak 38 responden berjenis kelamin laki-laki dan hanya 2 responden perempuan yang berhasil diwawancarai. Sementara itu, di Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Way Kalam, dari total responden yang berhasil dijumpai, terdapat 32 orang laki-laki dan hanya 1 orang perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Minimnya jumlah responden perempuan mencerminkan rendahnya tingkat partisipasi gender dalam pengelolaan kelompok tani hutan di kedua wilayah studi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan, terutama dalam kegiatan teknis dan pengambilan keputusan kelembagaan, masih sangat terbatas. Kondisi tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya setempat yang masih menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam aktivitas pengelolaan sumber daya hutan. Dengan demikian, perlu adanya upaya peningkatan kesetaraan gender dalam pengelolaan kelompok tani hutan agar tercipta tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

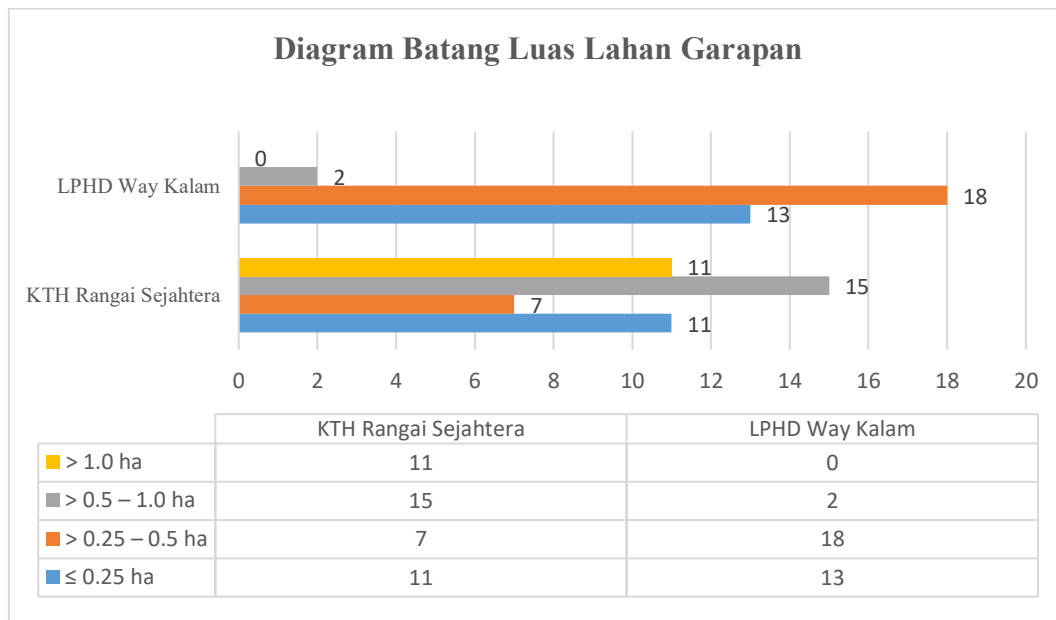
**Gambar 3 Diagram Usia Responden**

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025*

Berdasarkan gambar 3 dari grafik dan tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar responden dari KTH Rangai Sejahtera berada pada rentang usia 46–55 tahun sebanyak 16 orang, diikuti oleh responden usia  $\geq 56$  tahun sebanyak 15 orang, 36–45 tahun sebanyak 9 orang, dan tidak terdapat responden pada rentang usia 26–35 tahun maupun  $\leq 25$  tahun. Sementara itu, responden dari LPHD Way Kalam juga didominasi oleh kelompok usia 46–55 tahun sebanyak 11 orang, kemudian diikuti oleh kelompok usia  $\geq 56$  tahun sebanyak 10 orang, 36–45 tahun sebanyak 7 orang, serta 26–35 tahun sebanyak 5 orang, dan tidak terdapat responden yang berusia  $\leq 25$  tahun.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anggota kelompok tani hutan di kedua lokasi penelitian berada pada usia produktif lanjut, yaitu antara 46 hingga  $\geq 56$  tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pengelolaan hutan masih banyak dilakukan oleh kelompok usia tua. Rendahnya jumlah responden dari usia muda menunjukkan adanya tantangan regenerasi dalam kelompok tani hutan, yang bisa berdampak pada keberlanjutan program perhutanan sosial ke depan.

**Gambar 4. Diagram Batang Luas Lahan Garapan**



Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 4, karakteristik responden berdasarkan luas lahan garapan menunjukkan perbedaan distribusi antara anggota KTH Rangai Sejahtera dan LPHD Way Kalam. Kategori yang digunakan dalam klasifikasi ini adalah:  $\leq 0,25$  ha,  $> 0,25 - 0,5$  ha,  $> 0,5 - 1,0$  ha, dan  $> 1,0$  ha. Pada KTH Rangai Sejahtera, mayoritas responden (18 orang) memiliki lahan garapan seluas lebih dari  $0,25 - 0,5$  hektar, disusul oleh 13 orang dengan lahan  $\leq 0,25$  hektar, kemudian 7 orang dengan lahan  $> 1,0$  hektar, dan 2 orang memiliki lahan  $> 0,5 - 1,0$  hektar.

Sementara itu, pada LPHD Way Kalam, sebagian besar responden 2 orang memiliki lahan seluas  $> 0,5 - 1,0$  hektar, diikuti oleh 13 responden dengan lahan  $\leq 0,25$  hektar, 18 responden dengan lahan  $> 0,25 - 0,5$  hektar, dan tidak ada responden yang memiliki lahan  $> 1,0$  hektar. Data ini menunjukkan bahwa anggota KTH Rangai Sejahtera cenderung memiliki lahan yang lebih sempit, namun terdapat sebagian yang memiliki lahan sangat luas ( $> 1,0$  ha). Di sisi lain, anggota LPHD Way Kalam lebih dominan berada pada kategori menengah yaitu  $> 0,5 - 1,0$  hektar, dan tidak ditemukan responden dengan lahan di atas 1 hektar.

## Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal merupakan salah satu syarat penting dalam analisis statistik parametrik, seperti uji Independent Samples t-Test. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Shapiro-Wilk* karena jumlah sampel kurang dari 50 responden per kelompok. Apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai Sig. kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan terhadap variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu variabel pembangunan berkelanjutan. Berikut ini merupakan pemaparan hasil uji normalitas berdasarkan hasil pengolahan data penelitian.



**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas variabel Pembangunan Berkelanjutan**

| Tests of Normality |       |                                 |    |      |              |    |      |
|--------------------|-------|---------------------------------|----|------|--------------|----|------|
| VAR0000            |       | Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup> |    |      | Shapiro-Wilk |    |      |
| 1                  |       | Statistic                       | df | Sig. | Statistic    | df | Sig. |
| VAR00002           | Skema | .210                            | 40 | .001 | .873         | 40 | .001 |
|                    | HKm   |                                 |    |      |              |    |      |
|                    | Skema | .224                            | 33 | .001 | .867         | 33 | .001 |
|                    | HD    |                                 |    |      |              |    |      |

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: dikelola oleh peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 1 Hasil uji normalitas dari variabel Pembangunan Berkelanjutan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 27 diketahui bahwa uji normalitas dilakukan menggunakan dua metode, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, untuk masing-masing kelompok responden pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi (Sig.) untuk kedua skema pada kedua metode uji menunjukkan hasil  $< 0,001$ , yang berarti lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Pada skema HKm, uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Sig. sebesar  $< 0,001$  dan uji Shapiro-Wilk juga sebesar  $< 0,001$ . Pada skema HD, uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Sig. sebesar  $< 0,001$  dan uji Shapiro-Wilk sebesar  $< 0,001$ .

Hasil uji normalitas dari variabel Pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan menunjukan bahwa seluruh nilai signifikansi dari kedua uji tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada kedua kelompok tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis selanjutnya tidak dapat menggunakan uji parametrik (seperti t-test) dan harus menggunakan uji nonparametrik yang sesuai, seperti *Mann-Whitney U Test*.

### Uji Hipotesis variabel pembangunan berkelanjutan

Uji hipotesis dari variabel pembangunan berkelanjutan, karena data variabel *Pembangunan Berkelanjutan* tidak berdistribusi normal berdasarkan hasil uji normalitas sebelumnya, maka pengujian dilakukan dengan menggunakan uji nonparametrik dengan metode Mann-Whitney U-Test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi pembangunan berkelanjutan pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Berikut ini merupakan hasil dari uji *Mann-Whitney U-Test*:

**Tabel 21 Uji Mann-Whitney U-Test Ranks**

|          |           | Ranks |           |              |
|----------|-----------|-------|-----------|--------------|
|          | VAR00001  | N     | Mean Rank | Sum of Ranks |
| VAR00002 | Skema HKm | 40    | 24.05     | 962.00       |
|          | Skema HD  | 33    | 52.70     | 1739.00      |
|          | Total     | 73    |           |              |

*Sumber: Dikelola oleh Peneliti, (2025)*

Berdasarkan tabel 2. Hasil uji Mann-Whitney U-Test dari variabel *Sustainable Livelihood Framework* yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 27 diketahui bahwa nilai rank dari skema Hutan Desa berjumlah 52.70 dan nilai rank dari skema Hutan Kemasyarakatan nilai rank berjumlah 24.05 dari total responden sebanyak 73 orang. Oleh karena itu Nilai mean rank pada skema HD sebesar 52.70 lebih tinggi dibandingkan skema HKm yang hanya sebesar 24.70.

**Tabel 3. Uji Mann-Whitney U-Test statistics**

| Test Statistics <sup>a</sup> |          |
|------------------------------|----------|
|                              | VAR00002 |
| Mann-Whitney U               | 142.000  |
| Wilcoxon W                   | 962.000  |
| Z                            | -5.798   |
| Asymp. Sig. (2-tailed)       | .001     |

a. Grouping Variable: VAR00001

*Sumber: Dikelola oleh Peneliti, (2025)*

Berdasarkan tabel 3, Hasil uji Mann-Whitney U-Test dari variabel Pembangunan Berkelanjutan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 27 diketahui bahwa Nilai Mann-Whitney U = 142,000, Nilai b = -5,798, Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = < 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,001), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua skema dalam hal pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima, yang berarti bahwa skema HKm dan HD menunjukkan perbedaan nyata dalam persepsi terhadap aspek pembangunan berkelanjutan.

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara dua skema perhutanan sosial, yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD), baik dalam persepsi terhadap pembangunan berkelanjutan maupun terhadap kesejahteraan subjektif. Hal ini dibuktikan melalui pengujian menggunakan metode Mann-Whitney U-Test, yang sesuai digunakan karena data tidak berdistribusi normal berdasarkan hasil uji normalitas sebelumnya.

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Variabel Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U-Test (Tabel 2 ), diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar < 0,001, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan yang signifikan secara statistik antara skema HKm dan HD dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima.

Perbedaan ini diperkuat dengan nilai mean rank yang lebih tinggi pada skema Hutan Desa (52,70) dibandingkan skema Hutan Kemasyarakatan (24,05). Artinya, persepsi masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan lebih baik pada skema HD. Nilai *mean rank* yang lebih tinggi disebabkan oleh beberapa faktor seperti dukungan dari pemerintah terhadap anggota KTH serta memiliki sistem tata kelola hutan yang baik, adanya dukungan kelembagaan, serta integrasi dengan program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif pada skema tersebut dengan kelola usahanya. Hal ini sejalan dengan pendekatan *Sustainable Livelihood Framework* yang menekankan pada peningkatan lima modal utama (modal alam, manusia, finansial, sosial, dan fisik) secara berkelanjutan. Skema HD tampaknya mampu memberikan akses dan kontrol lebih besar kepada masyarakat desa dalam mengelola sumber daya hutan secara adil dan berkelanjutan. Berikut ini beberapa faktor yang menyebankan skema HD yang diterapkan oleh LPHD Way Kalam lebih unggul dengan skema HKM yang diterapkan oleh KTH Rangai Sejahtera dengan pendekatan *Sustainable Livelihood Framework*:

#### Modal Alam (*Natural Capital*)

Modal Alam (*Natural Capital*) dalam Skema Perhutanan Sosial: Studi LPHD Way Kalam dan KTH Rangai Sejahtera. Modal alam, menurut Scoones (1998), mencakup sumber daya seperti tanah, air, udara, hutan, dan keanekaragaman hayati yang menopang kehidupan masyarakat. Dalam kerangka *Sustainable Livelihood Framework* (SLF), modal ini berperan penting dalam menciptakan penghidupan berkelanjutan, terutama dalam konteks Perhutanan Sosial. Penelitian ini membandingkan pemanfaatan modal alam antara dua skema Perhutanan Sosial: Hutan Desa (LPHD Way Kalam) dan Hutan Kemasyarakatan (KTH Rangai Sejahtera). Hasil survei terhadap responden yang dianalisis menggunakan SPSS 26 menunjukkan perbedaan signifikan pada tiga indikator utama:

**Tabel 4. Perbedaan Pernyataan Dimensi Modal Alam**

| SKEMA HKM (KTH Rangai Sejahtera) |             |    |             |    |            |    | SKEMA HD (LPHD Way Kalam) |    |             |    |             |    |
|----------------------------------|-------------|----|-------------|----|------------|----|---------------------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Pernyataan                       | 1           |    | 2           |    | 3          |    | 1                         |    | 2           |    | 3           |    |
|                                  | %           | F  | %           | F  | %          | F  | %                         | F  | %           | F  | %           | F  |
| TS=1 poin                        | 0%          | 0  | 0%          | 0  | 0%         | 0  | 0%                        | 0  | 0%          | 0  | 0%          | 0  |
| KS=2 poin                        | 0%          | 0  | 25%         | 10 | 0%         | 0  | 0%                        | 0  | 0%          | 0  | 0%          | 0  |
| S=3 poin                         | 73%         | 29 | 63%         | 25 | 40%        | 16 | 37%                       | 12 | 38%         | 19 | 24%         | 8  |
| SS=4 poin                        | 64%         | 11 | 12%         | 5  | 60%        | 24 | 64%                       | 21 | 42%         | 14 | 75%         | 25 |
| <b>Mean</b>                      | <b>3,27</b> |    | <b>2,87</b> |    | <b>3,6</b> |    | <b>3,63</b>               |    | <b>3.42</b> |    | <b>3.75</b> |    |

*Sumber: Dikelola Oleh Peneliti, (2025)*

Berdasarkan tabel 4, pernyataan dari dimensi modal alam menunjukkan adanya perbedaan tingkat modal alam antara KTH Rangai Sejahtera (HKm) dan LPHD Way Kalam (HD) pada tiga pernyataan berikut:

Pernyataan tentang pemberian Akses Legal terhadap Hasil Hutan. Rata-rata tanggapan LPHD Way Kalam lebih tinggi (mean = 3,63) dibanding KTH Rangai Sejahtera (mean = 3,27), menunjukkan bahwa anggota LPHD merasa memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dalam pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu (HHBK). Pernyataan tentang Kualitas Lingkungan Hutan yang tetap terjaga. LPHD Way Kalam (mean = 3,42) dinilai lebih baik daripada KTH

Rangai Sejahtera (mean = 2,87), mencerminkan kondisi lingkungan yang lebih terjaga dan mendukung keberlanjutan usaha kelompok. Pernyataan tentang manfaat ekonomi dari hasil hutan. Anggota LPHD Way Kalam merasakan manfaat ekonomi yang lebih besar (mean = 3,75) dibanding anggota KTH Rangai Sejahtera (mean = 3,6).

Perbedaan juga terlihat dari luas lahan garapan. Anggota LPHD rata-rata mengelola lahan di bawah 0,5 hektar, sedangkan anggota KTH memiliki luasan yang lebih bervariasi dan cenderung lebih besar, hingga di atas 1 hektar. Dari aspek pemanfaatan kawasan hutan, LPHD Way Kalam mengembangkan kopi sebagai komoditas utama dan menjadikan Air Terjun Way Kalam sebagai destinasi wisata. Produk kopi diolah menjadi kopi bubuk untuk meningkatkan nilai jual. Sebaliknya, KTH Rangai Sejahtera memfokuskan pada tanaman pala dengan olahan produk turunan berupa sirup pala, memanfaatkan bagian buah yang sebelumnya tidak bernilai ekonomi. Berikut ringkasan perbedaan pemanfaatan hutan:

Tabel 5. Pemanfaatan kawasan Hutan kedua skema

| No | Jenis pemanfaatan         | SKEMA HKM (KTH Rangai Sejahtera)           | SKEMA HD (LPHD Way Kalam)                        |
|----|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Hasil Hutan               | Buah Pala                                  | Buah Kopi                                        |
| 2  | Pemanfaatan kawasan hutan | Menjadikan sentra pala di Provinsi Lampung | Destinasi wisata alam yaitu Air Terjun Way Kalam |
| 3  | Produk turunan            | Sirup pala                                 | Kopi bubuk                                       |

*Sumber: Dikelola oleh peneliti 2025*

Kedua kelompok menerapkan strategi penanaman *MultiPurpose Tree Species* (MPTS) atau tanaman serbaguna seperti pala dan kopi, yang sejalan dengan prinsip SLF. Namun, tantangan dihadapi KTH Rangai Sejahtera berupa serangan hama akibat dominasi tanaman pala, menunjukkan pentingnya diversifikasi. Modal alam menjadi komponen penting dalam keberhasilan skema Perhutanan Sosial. Meski kedua kelompok memiliki akses legal atas pengelolaan hutan, terdapat perbedaan mencolok dalam strategi pemanfaatannya. LPHD Way Kalam unggul dalam konservasi dan diversifikasi usaha, sedangkan KTH Rangai Sejahtera berfokus pada pengembangan komoditas unggulan berbasis pala. Keduanya mencerminkan model adaptif pengelolaan sumber daya alam yang berbeda dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Modal alam mencakup akses legal, kualitas lingkungan, dan manfaat ekonomi hutan bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota LPHD Way Kalam memiliki akses legal dan persepsi kualitas lingkungan hutan yang lebih baik dibanding KTH Rangai Sejahtera, serta lebih merasakan manfaat ekonomi hutan. Perbedaan pemanfaatan kawasan hutan juga terlihat: LPHD Way Kalam fokus pada komoditas kopi dan pengembangan wisata Air Terjun Way Kalam, sedangkan KTH Rangai Sejahtera fokus pada pala sebagai komoditas utama dan produk olahan sirup pala. Strategi pemanfaatan tanaman MPTS ini mencerminkan optimalisasi modal alam untuk mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat sesuai teori SLF Scoones (1998).

## Modal Fisik (*Physical Capital*)

Modal Fisik (Physical Capital) Skema Perhutanan Sosial: Studi LPHD Way Kalam dan KTH Rangai Sejahtera. Modal fisik, menurut Scoones (1998), mencakup infrastruktur dasar, alat produksi, serta sarana pendukung yang menunjang mata pencaharian masyarakat. Dalam kerangka *Sustainable Livelihood Framework* (SLF), modal ini memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan keberlanjutan kehidupan. Hasil analisis terhadap tiga indikator utama menunjukkan bahwa LPHD Way Kalam (Skema HD) memiliki modal fisik yang lebih memadai dibandingkan KTH Rangai Sejahtera (Skema HKM).

**Tabel 6. Pernyataan dari dimensi Modal Fisik**

| SKEMA HKM (KTH Rangai Sejahtera) |             |    |             |    |             |    | SKEMA HD (LPHD Way Kalam) |    |             |    |             |    |
|----------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Pernyataan                       | 13          |    | 14          |    | 15          |    | 13                        |    | 14          |    | 15          |    |
|                                  | %           | F  | %           | F  | %           | F  | %                         | F  | %           | F  | %           | F  |
| TS=1 poin                        | 0%          | 0  | 0%          | 0  | 0%          | 0  | 0%                        | 0  | 0%          | 0  | 0%          | 0  |
| KS=2 poin                        | 12%         | 5  | 45%         | 18 | 45%         | 20 | 0%                        | 0  | 30%         | 10 | 6%          | 2  |
| S=3 poin                         | 88%         | 35 | 55%         | 22 | 55%         | 18 | 42%                       | 14 | 49%         | 16 | 64%         | 21 |
| SS=4 poin                        | 0%          | 0  | 0%          | 0  | 6%          | 2  | 58%                       | 19 | 21%         | 7  | 30%         | 10 |
| <b>Mean</b>                      | <b>2,87</b> |    | <b>2,55</b> |    | <b>2,55</b> |    | <b>3,57</b>               |    | <b>2,90</b> |    | <b>3,24</b> |    |

*Sumber: Dikelola oleh peneliti, (2025)*

Berdasarkan tabel 6, perbandingan dimensi modal fisik antara Skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) di KTH Rangai Sejahtera dan Skema Hutan Desa (HD) di LPHD Way Kalam menunjukkan variasi yang signifikan pada ketiga indikator yang diukur. Infrastruktur Penunjang Usaha, pada indikator ketersediaan infrastruktur seperti jalan, alat produksi, dan fasilitas pemasaran, LPHD Way Kalam mencatat skor rata-rata 3,57, dengan 58% responden menyatakan sangat setuju. Sebaliknya, KTH Rangai Sejahtera hanya memperoleh skor 2,87, tanpa ada responden yang menjawab sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur di Way Kalam lebih mendukung keberlanjutan usaha kelompok. Akses terhadap Teknologi/Alat Modern, LPHD Way Kalam memiliki mean 2,90, dengan 30% responden sangat setuju. Alat produksi kopi seperti mesin pengupas kulit kopi (pulper) dan penggiling biji telah tersedia dan beroperasi dengan tenaga mesin. Sementara itu, KTH Rangai Sejahtera hanya mencatat skor 2,55, dan masih mengandalkan alat manual dalam mengolah pala, yang berdampak pada rendahnya efisiensi dan inovasi produk. Sarana Transportasi, Sarana transportasi untuk distribusi hasil hutan juga lebih baik di Way Kalam (mean = 3,24) dibanding Rangai Sejahtera (mean = 2,55). Di kedua lokasi, akses jalan masih terbatas, namun kendaraan roda dua seperti sepeda motor sudah bisa digunakan meskipun jalan belum seluruhnya beraspal.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan dan pemanfaatan modal fisik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan kelompok tani hutan dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari dan produktif. LPHD Way Kalam sebagai pemegang izin Hutan Desa menunjukkan keunggulan dalam hal pemenuhan modal fisik dibandingkan KTH Rangai Sejahtera yang mengelola hutan di bawah skema Hutan Kemasyarakatan. Keunggulan ini tercermin dari tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan produksi, pasca-panen, dan distribusi hasil hutan bukan kayu (HHBK), khususnya komoditas kopi.

Di Way Kalam menunjukkan bahwa kelompok telah memiliki dan memanfaatkan peralatan modern seperti mesin pulper (pengupas kulit kopi), pengering biji kopi, serta alat penggiling kopi. Peralatan ini tidak hanya mempercepat proses produksi, tetapi juga meningkatkan mutu

dan nilai tambah produk yang dihasilkan. Pemanfaatan teknologi ini sebagian besar diperoleh dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, LSM, maupun program CSR perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antar aktor dalam memperkuat kapasitas fisik masyarakat desa hutan. Dengan adanya alat-alat ini, kelompok tani kopi di Way Kalam mampu menghasilkan produk olahan seperti kopi bubuk kemasan yang siap dipasarkan ke luar daerah, bahkan telah mengikuti berbagai pameran produk lokal dan nasional.

Sebaliknya, di KTH Rangai Sejahtera, pemanfaatan modal fisik masih sangat terbatas. Komoditas unggulan berupa pala sebagian besar masih diolah secara manual. Proses pengupasan, pengeringan, hingga pengemasan dilakukan dengan cara tradisional tanpa alat bantu modern. Hal ini menyebabkan nilai tambah dari produk pala sulit untuk ditingkatkan, dan kelompok hanya mampu menjual dalam bentuk bahan mentah kepada pengepul. Ketiadaan alat pengolahan serta terbatasnya akses terhadap pelatihan atau fasilitasi teknologi menjadi salah satu faktor penghambat. Selain itu, belum optimalnya dukungan kelembagaan pendampingan serta minimnya akses terhadap program pemberdayaan menjadi penyebab rendahnya kualitas modal fisik di lokasi ini.

Dari sisi infrastruktur transportasi, Way Kalam memiliki akses jalan yang relatif lebih baik, meskipun masih berupa jalan tanah dan berbatu. Sebagian besar jalan menuju lokasi perkebunan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat dengan tingkat kesulitan sedang. Kondisi ini berbeda dengan Rangai Sejahtera, di mana akses jalan ke lokasi perkebunan masih sulit dijangkau, terutama saat musim hujan. Akses jalan yang rusak memperlambat mobilisasi hasil panen ke pasar dan meningkatkan biaya distribusi.

Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan ketersediaan modal fisik berdampak langsung terhadap produktivitas, efisiensi usaha, serta daya saing produk kelompok tani hutan. Dalam hal ini, LPHD Way Kalam menunjukkan keberhasilan dalam memanfaatkan dukungan dari luar untuk meningkatkan kapasitas modal fisik mereka. Keberadaan sarana produksi dan infrastruktur yang memadai menjadi faktor kunci dalam mendorong inovasi dan diversifikasi produk.

Temuan ini memperkuat pendapat Wulandari dan Inoue (2018) yang menyatakan bahwa keterjangkauan sarana dan prasarana fisik merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program perhutanan sosial. Ketersediaan alat dan infrastruktur memungkinkan masyarakat untuk mengelola hutan secara efisien dan berkelanjutan, serta membuka peluang lebih besar dalam pengembangan usaha berbasis hasil hutan. Dengan demikian, investasi pada modal fisik bukan hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam rantai nilai produk kehutanan.

Modal fisik meliputi sarana prasarana produksi dan infrastruktur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPHD Way Kalam memiliki modal fisik yang lebih baik dibanding KTH Rangai Sejahtera, terutama pada ketersediaan mesin pengolahan kopi dan sarana transportasi untuk distribusi hasil hutan. Sebaliknya, di KTH Rangai Sejahtera, pengolahan pala masih dilakukan secara manual dengan alat sederhana. Akses teknologi modern di LPHD Way Kalam juga relatif lebih baik, meskipun keduanya masih menghadapi keterbatasan alat produksi dan infrastruktur. Modal fisik yang memadai terbukti meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah hasil hutan, mendukung strategi penghidupan berkelanjutan masyarakat.

### **Modal Finansial (*Financial Capital*)**

Modal finansial merupakan salah satu komponen penting dalam kerangka Sustainable Livelihood Framework (SLF), yang mencakup sumber daya keuangan seperti tabungan,

pendapatan rutin, akses kredit, dan bantuan lainnya yang dapat digunakan rumah tangga untuk mencapai tujuan penghidupan (DFID, 1999). Modal ini bersifat fleksibel karena dapat dikonversi menjadi bentuk modal lainnya, seperti fisik, manusia, atau alam. Namun, masyarakat miskin umumnya memiliki keterbatasan dalam mengaksesnya akibat pendapatan yang rendah dan terbatasnya jangkauan lembaga keuangan formal. Berdasarkan hasil penelitian, modal finansial di LPHD Way Kalam relatif lebih baik dibandingkan KTH Rangai Sejahtera, meskipun keduanya masih menunjukkan keterbatasan dalam hal pendapatan yang cukup dan stabil dari hasil hutan. Analisis terhadap tiga pernyataan dalam dimensi modal finansial menghasilkan temuan sebagai berikut:

Tabel 7 Pernyataan dari dimensi Modal Finansial

| SKEMA HKM (KTH Rangai Sejahtera) |             |    |             |    |             |    | SKEMA HD (LPHD Way Kalam) |    |             |    |             |    |
|----------------------------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------------------|----|-------------|----|-------------|----|
| Pernyataan                       | 13          |    | 14          |    | 15          |    | 13                        |    | 14          |    | 15          |    |
|                                  | %           | F  | %           | F  | %           | F  | %                         | F  | %           | F  | %           | F  |
| TS=1 poin                        | 0%          | 0  | 0%          | 0  | 0%          | 0  | 0%                        | 0  | 0%          | 0  | 0%          | 0  |
| KS=2 poin                        | 12%         | 5  | 45%         | 18 | 45%         | 20 | 0%                        | 0  | 30%         | 10 | 6%          | 2  |
| S=3 poin                         | 88%         | 35 | 55%         | 22 | 55%         | 18 | 42%                       | 14 | 49%         | 16 | 64%         | 21 |
| SS=4 poin                        | 0%          | 0  | 0%          | 0  | 6%          | 2  | 58%                       | 19 | 21%         | 7  | 30%         | 10 |
| <b>Mean</b>                      | <b>2,87</b> |    | <b>2,55</b> |    | <b>2,55</b> |    | <b>3,57</b>               |    | <b>2,90</b> |    | <b>3,24</b> |    |

Sumber: Dikelola oleh peneliti, (2025)

Berdasarkan tabel 7 menunjukan bahwa Pernyataan 13: "Pendapatan dari hasil hutan cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga." Nilai rata-rata (mean) di KTH Rangai Sejahtera sebesar 2,37, sementara di LPHD Way Kalam sedikit lebih tinggi, yaitu 2,51. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota di kedua kelompok belum menganggap pendapatan hasil hutan cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, meskipun LPHD menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih baik. Pernyataan 14: "Saya memiliki sumber pendapatan tambahan selain dari hasil hutan." LPHD Way Kalam mencatat mean 2,78, lebih tinggi dari KTH Rangai Sejahtera (2,45). Hal ini menunjukkan bahwa anggota LPHD lebih banyak memiliki sumber penghasilan tambahan, seperti kebun pribadi di luar kawasan izin atau usaha lain yang terkait dengan pariwisata lokal (misalnya, menjual kopi kepada wisatawan di Air Terjun Way Kalam). Pernyataan 15: "Pendapatan stabil sepanjang tahun dari usaha berbasis hutan." Kedua kelompok mencatat nilai mean yang sama, yaitu 2,30. Ini mengindikasikan bahwa pendapatan dari hasil hutan masih belum stabil sepanjang tahun karena bersifat musiman, seperti kopi dan pala yang hanya dipanen setahun sekali. Ketidakstabilan ini berdampak langsung pada ketidakcukupan penghasilan rumah tangga secara keseluruhan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa LPHD Way Kalam mendapat manfaat tambahan dari ekowisata yang mendukung pemasaran produk seperti kopi bubuk. Sebaliknya, KTH Rangai Sejahtera masih dalam tahap promosi wisata edukasi tanaman pala, dengan produk turunan seperti sirup pala serta biji pala yang dijual ke tengkulak. Namun, kedua kelompok masih mengandalkan pendapatan non-hutan seperti buruh tani, pekerja lepas, atau usaha informal lainnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini mencerminkan bahwa modal finansial dari hasil hutan dalam skema perhutanan sosial belum mampu menopang kebutuhan ekonomi secara penuh dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Achmad & Diniyati (2018), yang menyatakan bahwa meskipun ada sumber pendapatan dari agroforestri



dan non-hutan, jumlahnya masih tergolong rendah. Wulandari & Inoue (2018) juga menekankan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat membutuhkan dukungan pendanaan agar mampu mencapai tujuan utama perhutanan sosial, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seperti ditegaskan oleh DFID (1999), modal finansial mencakup baik stok keuangan (tabungan) maupun arus pendapatan rutin. Namun, dari temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok belum memenuhi indikator tersebut secara optimal. Kesejahteraan ekonomi belum tercapai jika kebutuhan dasar belum terpenuhi secara stabil dan berkelanjutan (Darmawan & Risnawati, 2020). Oleh karena itu, dukungan pendanaan, diversifikasi usaha, dan penguatan akses terhadap pasar menjadi strategi kunci untuk memperkuat modal finansial masyarakat dalam skema perhutanan sosial.

### **Modal Manusia (*Human Capital*)**

Modal manusia merupakan salah satu unsur utama dalam *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) yang dikembangkan oleh Scoones (1998). Dimensi ini mencakup kemampuan, keterampilan, pengetahuan, pengalaman kerja, serta kesehatan individu yang berkontribusi terhadap kapasitas masyarakat dalam membangun dan mempertahankan strategi penghidupan yang berkelanjutan. Dalam konteks perhutanan sosial, modal manusia menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan anggota kelompok dalam mengelola sumber daya hutan secara produktif dan lestari.

Tabel 8 Pernyataan dari dimensi Modal Finansial

| Pernyataan  | SKEMA HKM (KTH Rangai Sejahtera) |    |             |    |             |    | SKEMA HD (LPHD Way Kalam) |    |             |    |             |    |
|-------------|----------------------------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------------------|----|-------------|----|-------------|----|
|             | 7                                |    | 8           |    | 9           |    | 7                         |    | 8           |    | 9           |    |
|             | %                                | F  | %           | F  | %           | F  | %                         | F  | %           | F  | %           | F  |
| TS=1 poin   | 0%                               | 0  | 0%          | 0  | 0%          | 0  | 0%                        | 0  | 0%          | 0  | 0%          | 0  |
| KS=2 poin   | 50%                              | 20 | 22%         | 9  | 32%         | 9  | 0%                        | 0  | 6%          | 6  | 18%         | 2  |
| S=3 poin    | 47%                              | 19 | 72%         | 29 | 77%         | 32 | 88%                       | 29 | 58%         | 20 | 61%         | 19 |
| SS=4 poin   | 3%                               | 1  | 6%          | 2  | 0%          | 0  | 12%                       | 4  | 36%         | 7  | 21%         | 12 |
| <b>Mean</b> | <b>2,52</b>                      |    | <b>2,82</b> |    | <b>2,77</b> |    | <b>3,12</b>               |    | <b>3,30</b> |    | <b>3,03</b> |    |

*Sumber: Dikelola oleh peneliti, (2025)*

Berdasarkan hasil tabel 8 menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam aspek modal manusia antara anggota Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Way Kalam dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Rangai Sejahtera. Hasil tabel diatas data menunjukkan bahwa rata-rata skor persepsi responden pada dimensi modal manusia di LPHD Way Kalam berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata di atas 3 pada skala Likert. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggota merasa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam pengelolaan hasil hutan, khususnya kopi, sebagai komoditas utama yang dikembangkan di wilayah tersebut. Selain itu, sebagian besar responden di LPHD Way Kalam juga menyatakan telah mengikuti berbagai bentuk pelatihan, seperti pelatihan budidaya kopi, teknik pasca panen, dan pengolahan kopi menjadi serbuk siap konsumsi.

Keikutsertaan anggota dalam pelatihan-pelatihan tersebut secara signifikan meningkatkan kapasitas individu, baik dari segi pengetahuan teknis maupun kemampuan manajerial dalam mengelola produk hasil hutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Chambers dan Conway (1992), yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.



Temuan ini juga diperkuat oleh kajian Wulandari dan Inoue (2018), yang menegaskan bahwa penyuluhan dan pelatihan yang berkelanjutan mampu mendorong peningkatan kompetensi teknis masyarakat dalam mengelola hutan secara Lestari.

Sebaliknya, pada KTH Rangai Sejahtera, nilai rata-rata persepsi responden terhadap dimensi modal manusia berada pada kategori sedang, dengan kisaran skor antara 2,52 hingga 2,82. Sebagian besar anggota kelompok menyatakan belum memiliki cukup keterampilan dalam mengelola hasil hutan, khususnya dalam pengolahan komoditas pala, yang merupakan komoditas unggulan di wilayah tersebut. Selain itu, mayoritas responden belum pernah mengikuti pelatihan teknis yang berkaitan dengan pengolahan atau pengembangan hasil hutan. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sebagian besar diperoleh melalui pengalaman langsung, namun belum terstruktur secara sistematis dan masih terbatas cakupannya.

Keterbatasan akses terhadap pelatihan, pendampingan, serta minimnya sumber daya pendukung (seperti bibit unggul dan alat pengolahan) menjadi faktor yang menghambat pengembangan kapasitas anggota kelompok. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai tambah dari komoditas yang dihasilkan dan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa LPHD Way Kalam memiliki keunggulan dalam aspek modal manusia dibandingkan dengan KTH Rangai Sejahtera. Ketersediaan akses terhadap pelatihan dan pendampingan teknis secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas individu dan kolektif kelompok dalam mengelola hasil hutan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas modal manusia melalui program pelatihan yang terarah dan berkelanjutan perlu menjadi prioritas dalam pengembangan kelompok tani hutan, terutama pada kawasan yang masih memiliki keterbatasan kapasitas seperti KTH Rangai Sejahtera. Strategi ini menjadi krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi program perhutanan sosial dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan.

### Modal Sosial (*Social Capital*)

Modal sosial merupakan salah satu dimensi utama dalam *Sustainable Livelihood Framework* (SLF), yang mencakup jaringan sosial, norma kepercayaan, dan hubungan antar-aktor yang mendukung strategi penghidupan masyarakat (Scoones, 1998). Dalam konteks perhutanan sosial, modal sosial memengaruhi efektivitas kerja sama, partisipasi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Tabel 9 Pernyataan dari Dimensi Modal Sosial

|            | SKEMA HKM (KTH Rangai Sejahtera) | SKEMA HD (LPHD Way Kalam) |
|------------|----------------------------------|---------------------------|
| Pernyataan | 10 11 12                         | 10 11 12                  |

|             | SKEMA HKM (KTH Rangai Sejahtera) |    |             |    |             |    | SKEMA HD (LPHD Way Kalam) |    |             |    |             |    |
|-------------|----------------------------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------------------|----|-------------|----|-------------|----|
|             | %                                | F  | %           | F  | %           | F  | %                         | F  | %           | F  | %           | F  |
| TS=1 poin   | 0%                               | 0  | 0%          | 0  | 0%          | 0  | 0%                        | 0  | 0%          | 0  | 0%          | 0  |
| KS=2 poin   | 0%                               | 0  | 25%         | 10 | 25%         | 10 | 0%                        | 0  | 15%         | 5  | 0%          | 0  |
| S=3 poin    | 92%                              | 37 | 72%         | 29 | 67%         | 27 | 60%                       | 20 | 64%         | 21 | 42%         | 14 |
| SS=4 poin   | 8%                               | 3  | 3%          | 1  | 8%          | 3  | 40%                       | 13 | 21%         | 7  | 58%         | 19 |
| <b>Mean</b> | <b>3,07</b>                      |    | <b>2,77</b> |    | <b>2,82</b> |    | <b>3,39</b>               |    | <b>3.06</b> |    | <b>3.06</b> |    |

Sumber; Diolah oleh peneliti 2025

Berdasarkan tabel 9, menunjukkan bahwa tingkat modal sosial LPHD Way Kalam lebih tinggi dibandingkan KTH Rangai Sejahtera. Hal ini terlihat dari tiga indikator utama: Dukungan kelompok: Nilai rata-rata (mean) LPHD Way Kalam sebesar 3,39, lebih tinggi dari KTH Rangai Sejahtera (3,07). Temuan ini mengindikasikan bahwa anggota LPHD merasa lebih didukung dalam mengelola usaha perhutanan sosial. Dukungan ini diperkuat oleh keberadaan sekretariat tetap yang berfungsi sebagai ruang berkumpul, memudahkan koordinasi, dan memperkuat solidaritas. Hal ini sejalan dengan Herdiyanti et al. (2022) dan Oktalina et al. (2022), yang menyatakan bahwa ketersediaan ruang bersama dapat meningkatkan bonding social capital melalui interaksi rutin dan berbagi informasi.

Kepercayaan antaranggota: Nilai *mean* di LPHD Way Kalam mencapai 3,06, lebih tinggi dari KTH Rangai Sejahtera (2,77). Tingkat kepercayaan ini tercermin dalam praktik gotong royong seperti pemeliharaan fasilitas wisata dan kegiatan sosial lainnya. Menurut Pretty & Ward (2001) serta Putnam (1995), kepercayaan merupakan elemen kunci dalam modal sosial yang mendorong kolaborasi dan mengurangi biaya sosial. Hubungan eksternal (pemerintah/LSM): LPHD Way Kalam mencatat nilai mean sebesar 3,06, sedikit lebih tinggi dari KTH Rangai Sejahtera (2,82). Kedua skema memiliki keterlibatan dalam proyek Strengthening of Social Forestry in Indonesia (SSF) di bawah naungan KLHK dan World Bank, namun terdapat perbedaan pola kemitraan. LPHD bekerja sama dengan WALHI dalam penguatan legalitas wilayah kelola melalui pelatihan pemetaan partisipatif, sementara KTH bermitra dengan PILI, Gojek, dan Jejak.in dalam program penanaman pohon dan restorasi berbasis teknologi. Kerja sama ini menunjukkan perbedaan fokus: LPHD menekankan penguatan kelembagaan, sedangkan KTH lebih menitikberatkan pada produktivitas lahan.

Perbedaan tingkat modal sosial juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan organisasi internal. Anggota LPHD berasal dari satu desa (Way Kalam), yang memungkinkan interaksi sosial lebih intens dan konsisten. Sebaliknya, anggota KTH tersebar di dua desa (Rangai Sejahtera dan Tarahan), yang berdampak pada keterbatasan frekuensi pertemuan dan koordinasi. Hal ini sesuai dengan temuan Lee et al. (2017), yang menyatakan bahwa kedekatan geografis meningkatkan interaksi dan membentuk kepercayaan timbal balik yang menjadi dasar modal sosial yang kuat. Selain itu, LPHD menunjukkan bentuk solidaritas ekonomi yang tinggi, misalnya dengan saling merekomendasikan homestay milik sesama anggota kepada wisatawan. Praktik ini mencerminkan norma timbal balik dan kohesi sosial yang kuat dalam kelompok, sebagaimana dikemukakan oleh Woolcock & Narayan (2000).

Secara keseluruhan, LPHD Way Kalam menunjukkan modal sosial yang lebih kuat dibanding KTH Rangai Sejahtera, baik dari sisi dukungan internal, kepercayaan antaranggota, maupun jaringan eksternal. Faktor kunci yang mendukung hal ini adalah kedekatan geografis,

keberadaan fasilitas bersama, serta praktik kolaboratif yang intens. Sementara itu, meskipun KTH menunjukkan nilai lebih rendah, potensi penguatan modal sosial tetap terbuka melalui perluasan kemitraan strategis dan peningkatan fasilitas organisasi. Dengan demikian, modal sosial terbukti menjadi faktor strategis dalam memperkuat keberdayaan masyarakat dan mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan dalam kerangka perhutanan sosial.

Modal sosial meliputi jaringan sosial, kepercayaan, dan hubungan dengan pihak eksternal. LPHD Way Kalam memiliki modal sosial lebih tinggi dibanding KTH Rangai Sejahtera, terlihat dari dukungan kelompok, kepercayaan antaranggota, dan hubungan eksternal yang lebih kuat. Kedekatan geografis anggota dalam satu desa serta ketersediaan sekretariat mendukung modal sosial LPHD Way Kalam. Sedangkan KTH Rangai Sejahtera memiliki keunggulan dalam kemitraan dengan NGO dan sektor swasta untuk reforestasi dan penguatan produktivitas.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbandingan pembangunan berkelanjutan antara anggota kelompok tani hutan pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) di Kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa: Terdapat perbedaan signifikan dalam pembangunan berkelanjutan antara anggota kelompok tani hutan yang tergabung dalam skema HKm (KTH Rangai Sejahtera) dan skema HD (LPHD Way Kalam) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji statistik *Mann-Whitney U-Test*, yang menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dengan hasil sebesar  $< 0,001$ , yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara skema HKm dan HD dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima. Hipotesis Alternatif ( $H_1$ ) penelitian ini adalah *terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan antara skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*. Temuan ini mendukung hipotesis alternatif ( $H_1$ ) yang menunjukan bahwa skema Hutan Desa memiliki keunggulan dan perbedaan yang dapat dijelaskan melalui lima modal utama dalam *Sustainable Livelihood Framework*:

Modal Alam: LPHD Way Kalam memberikan akses legal yang lebih merata, dengan pemanfaatan komoditas kopi dan tamana MTPS serta di dukung dengan adanya jasa ekowisata yang memperkuat hubungan masyarakat dengan lingkungan, dibandingkan KTH Rangai Sejahtera yang berfokus pada tanaman Pala sebagai komoditas utama karena ingin membuat KTH ini terkenal sebagai sentra Pala. Modal Fisik: Sarana produksi seperti mesin pengolahan kopi dan akses transportasi yang lebih baik di LPHD Way Kalam memungkinkan peningkatan nilai tambah hasil hutan dan efisiensi distribusi, dibandingkan alat sederhana yang masih digunakan di KTH Rangai Sejahtera. Modal Finansial: Meskipun kedua skema belum memberikan pendapatan yang stabil secara penuh, LPHD Way Kalam memiliki variasi sumber penghasilan tambahan seperti rumah mereka ada yang dijadikan sebagai tempat penginapan atau *homestay* yang mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Modal Manusia: Tingkat pelatihan dan pengembangan kapasitas yang lebih intensif di LPHD Way Kalam membentuk sumber daya manusia yang lebih siap dalam menjalankan strategi usaha kehutanan karena jumlah anggotanya yang sedikit sekitar 132 orang sehingga pelatihan bisa dilakukan merata, dibandingkan KTH Rangai Sejahtera angotanya memiliki keterbatasan akses pelatihan sehingga belom merata untuk pelatihan yang di berikan oleh pemerintah karena jumlah mereka sebanyak 419 orang. Modal Sosial: LPHD Way Kalam memiliki kohesi sosial yang kuat karena homogenitas wilayah, sekretariat tetap, dan kepercayaan antarkomunitas, sementara KTH Rangai Sejahtera menunjukkan kekuatan dalam membangun jaringan eksternal melalui kolaborasi dengan NGO dan sektor swasta.

## REFERENCES

- Achmad, B., & Diniyati, D. (2018). The income structure of smallholder forest farmers in rural sumbawa, Indonesia. *Biodiversitas*, 19(3), 936–946. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d190324>
- Ayu, H. Y., Kaskoyo, H., Yuwono, S. B., Banuwa, I. S., & Safe'i, R. (2022). Penilaian Dampak Hutan Kemasyarakatan Melalui Sustainable Livelihoods Framework. *Jurnal Hutan Tropis*, 10(1), 47. <https://doi.org/10.20527/jht.v10i1.13087>
- Darmawan, D., & Risnawati. (2020). Hasil Pemberdayaan Masyarakat Oleh Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi di Koperasi Serba Usaha Mandiri Kasemen, Kota Serang. *E-Plus : Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 205–212.
- Dewi, V. P. (2023). *Pengaruh Tingkat Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Kph Batu Tegi)*. 11.
- Dfid, (Departement for International Development). (1999). Sustainable Livelihoods Guidance Sheets Framework Introduction Vulnerability Transforming. In *Context*. <http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0901/section2.pdf%3E>
- Diener, E. (2009). Assessing Well-Being. The Collected Works of Ed Diener. *Springer*, 101–102. <https://doi.org/10.1007/978-90-481-2354-4>
- Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, Culture, and Subjective Well-being: Emotional and Cognitive Evaluations of Life. *Annual Review of Psychology*, 54, 403–425. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145056>
- Kantor Staff Kepresidenan. (2016). *Atasi Kemiskinan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan, Presiden Jokowi: Permudah Akses Perhutanan Sosial*. Ksp.Go.Id. <http://ksp.go.id/atasi-kemiskinan-masyarakat-sekitar-kawasan-hutan-presiden-jokowi-permudah-akses-perhutanan-sosial/>
- Kementerian Kehutanan. (2025). *Daftar Capaian Perhutanan Sosial*. GoKUPS. <https://gokups.menlhk.go.id/public/achievements>
- Lee, Y., Rianti, I. P., & Park, M. S. (2017). Measuring social capital in Indonesian community forest management. *Forest Science and Technology*, 13(3), 133–141.
- Machali, I. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif (Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan, dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif). In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* (Vol. 01, Issue April). [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50344/1/Metode Penelitian Kuantitatif %20Panduan Praktis Merencanakan%2C Melaksa.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50344/1/Metode%20Penelitian%20Kuantitatif%20Panduan%20Praktis%20Merencanakan%20Melaksa.pdf)
- Mentri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). Pedoman Kelompok Tani Hutan. In *Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia*.
- Midgley, J. (1995). *Pembangunan sosial: perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). Buku Ajar Dasar-dasar Statistik Penelitian. In *Sibuku Media*.
- Oktalina, S. N., Suka, A. P., Bisjoe, A. R. H., Muin, N., & Race, D. (2022). Understanding social capital in management of community forest in indonesia. *Habitat*. <https://habitat.ub.ac.id/index.php/habitat/article/view/3426>
- Permen LHK No. 9 Tahun. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*.
- Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of*

- Democracy*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>
- Scoones, I. (1998b). Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis. *IDS Working Paper*, 72, 22. [http://forum.ctv.gu.se/learnloop/resources/files/3902/scoones\\_1998\\_wp721.pdf](http://forum.ctv.gu.se/learnloop/resources/files/3902/scoones_1998_wp721.pdf)
- Sugiyono. (2017). *statistika untuk penelitian* (cetakan 30).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140* (Vol. 19, Issue 19). [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU\\_32\\_Tahun\\_2009%28PPLH%29.pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU_32_Tahun_2009%28PPLH%29.pdf)
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225–249.
- Wulandari, C., & Inoue, M. (2018). *Pentingnya Pembelajaran Sosial bagi Pengembangan Hutan Berbasis Masyarakat*.
- Zeilika, E., Kaskoyo, H., & Wulandari, C. (2021). Pengaruh Partisipasi Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Gapoktan Mandiri Lestari Kph Viii Batu Tegi). *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2), 291. <https://doi.org/10.20527/jht.v9i2.11277>